

ABSTRAK

Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010)

Oleh

Lia Agustina Sary

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan wewenang kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya masing-masing. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tetapi desentralisasi pemerintahan justru menjadi ajang untuk memperkaya diri dan perpanjangan korupsi oleh para elite politik di daerah. Pilkada langsung sesungguhnya diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki visi politik untuk membangun moralitas pemerintahan yang kuat. Harapan ini sulit terlaksana dalam kenyataan karena sistem rekrutmen pejabat birokrasi yang bersifat transaksional

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi manifestasi politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan; (b) mengidentifikasi mengapa terjadi politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manifestasi politisasi birokrasi pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan adalah (a) Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran, (b) jual beli jabatan, (c) politik transaksional, dan (d) disfungsi peran Baperjakat. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi yaitu (a) kepentingan kekuasaan atau politik, (b) kepentingan karir birokrat atau patron client, (c) nepotisme, dan (d) politik dinasti.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah (1) Pemerintah lebih berpedoman kepada Undang-Undang dalam proses reformasi birokrasi dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat, (2) para birokrat diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat, dan (3) peran aktif masyarakat, pers, media, LSM, aparat yang berwenang, dan

setiap lapisan masyarakat lebih ditingkatkan dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Birokrasi, Politisasi Birokrasi.